

## Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Tahun 2018 Pada UKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Bandung

**Irene Sukma Lestari Barus**

irene.sukma@widyatama.ac.id

Universitas Widyatama

**Harry Suharman**

harry.suharman@unpad.ac.id

Universitas Padjajaran

### ABSTRACT

*This research contributes to the Small and Medium Enterprises in recording business transactions using the Small and Medium Entity Financial Accounting Standards (SAK EMKM) in 2018. Financial statements are made in the form of a Balance Sheet, Income Statement and Notes to Financial Statements. This is a qualitative study conducted to MSEs in Bandung Regency. Sources data from Interview Unstructure and Focus Group Discussion. The recording system that has been conducted generally uses a cash basis rather than an accrual basis. The results of this study propose that the recording system carried out consists of a periodic system and an accrual-based perpetual system.*

**Keywords: Accounting; Financial Statement; Small and Medium Entity Financial Accounting Standards (SAK EMKM).**

### INTRODUCTION

Selain pembangunan infrastruktur, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan ekonomi bangsa dengan menyalurkan dana desa agar melalui dana desa diharapkan Pemerintah dapat memberdayakan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes. Padahal jika perekonomian ingin maju, UMK milik masyarakat harus disokong dengan manajemen yang maju dan terorganisir. Berdasarkan Listing Sensus EKonomo di tahun 2016, mengklasifikasikan jenis usaha menurut skalanya yaitu Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar. Dari Listing ini diperoleh bahwa di tahun 2016, struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh UMK dengan jumlah 26,26 Juta usaha atau 98,33% dari total perusahaan di Indonesia ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses 2 Agustus 2017 pukul 06.49). Sehingga disimpulkan, peranan UMK masih sangat penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai Program Agenda Prioritas Nawacita ke -3 Jokowi-Jusuf Kalla pada Periode 2014 – 2019 yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Program ini

dilaksanakan dengan menyalurkan dana desa setiap tahun yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat alokasi anggaran dana desa mencapai IDR. 248 Triliun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 ke seluruh desa yang ada di Indonesia dimana setiap desa rata-rata menerima dana desa kisaran sekitar IDR 500 Juta hingga IDR 1 Milyard (Sumber : Economy.okezone.com, diakses 14 Januari 2019, pukul 09.42 WIB). Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana, mengungkapkan BumDes dapat mendorong dan menggerakkan usaha desa yang dikenal dengan UMKM yang disertai keterlibatan pengusaha yang ada di wilayah tersebut. (25 April 2019). Keberadaan desa ini diperkuat dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Beliau juga mengatakan bahwa terdapat 270 jumlah BumDes yang ada di Kabupaten Bandung. Hampir semua desa di Kabupaten Bandung telah memiliki BUMDes yang dimana terdapat 85 BumDes yang berkembang sedang sisanya sebagai BumDes pemula. Jadi antara BumDes dan UMKM merupakan satu bagian penggerak sektor ekonomi lokal di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung. Menurut data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, kabupaten bandung memiliki 348.858 UMK dan 4.419 UMB.

Tentunya kalau dilihat dari data yang ada, Kabupaten Bandung menempati posisi nomor 2 di tahun 2016 terbanyak UMK setelah Bogor. BumDes juga mengucurkan dana nya untuk membantu mengembangkan usaha bagi pelaku UMK. Menurut Agun Gunandjar Sudarsa (2018) sebagai Anggota DPR RI Komisi XI, Dana desa tidak hanya digunakan untuk infrastruktur namun juga dapat digunakan untuk permodalan bagi para pelaku usaha mikro di desa karena sulitnya mencari permodalan bagi pelaku usaha mikro tersebut. Dengan berkembangnya UMKM di desa dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan penghasilan sehingga gerak ekonomi rakyat semakin efektif. Adapun berdasarkan wawancara yang diperoleh, pelaku UMK terbanyak bergerak di sektor dagang. Dana BumDes dapat digunakan untuk membantu pengadaan alat-alat produksi yang mampu menaikkan jumlah produksi selain itu dapat berfungsi sebagai tempat mengusahakan permodalan, pemasaran, pengemasan barang dan branding. Desa memiliki potensial selain alamnya yang indah yakni usaha desanya berupa industri rumah yang dikenal dengan UMKM. Sehingga antara UMKM dengan BumDes sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) menyatakan, kuantitas dan kualitas UMKM terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terdapat sebanyak 12,7 juta unit usaha, dan pada Juni 2011 meningkat menjadi 53,2 juta unit usaha. Adapun sektor UMKM telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Data Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2013 memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, hal ini tentu memberikan dampak yang positif jika dilihat dari total nilai yang diperoleh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 9.014,9 Triliun. Tentu peran UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp.

5.440 Triliun atau 60,34 persen dari total PDB Indonesia. Jumlah populasi UMKM Indonesia pada tahun 2013 mencapai 57,89 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha Indonesia, sementara dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114,14 juta orang atau 96,99 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. (Kementerian Koperasi. [www. depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Tapi ironisnya, banyak UMKM yang masih belum tersentuh jasa perbankan. Padahal masalah mendasar UMKM adalah modal usaha. Fakta yang terjadi tingkat kebutuhan SAK ETAP bagi UMKM masih sangat rendah serta SAK ETAP masih dirasa memberatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penyebabnya karena para pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha mereka. Proses akuntansi dipandang tidak terlalu penting untuk diterapkan oleh beberapa pengusaha kecil, sehingga pengelolaan laporan keuangan di dalam perusahaan terkesan apa adanya. Hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan pengelola usaha kecil menjadi berantakan dan akan menyulitkan manajer dalam mengontrol tentang informasi akuntansinya.

Ini yang menjadi permasalahan UMKM pada saat ini, khususnya di bidang keuangan. Permasalahan tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya, DSAK IAI pada tahun 2016 telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BumDes, pelaku UMKM dibawa binaan BumDes mendapat kesulitan dalam membuat laporan keuangan dikarenakan kekurangan pengetahuan pelaku UMKM di bidang akuntansi dalam pencatatan akuntansi untuk membuat laporan keuangan mereka sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BumDes yang dikelola oleh pelaku UMKM. Selama ini sistem pencatatan kebanyakan dilakukan oleh pelaku UMKM adalah berbasis kas bukan berbasis akrual. Adapun laporan pertanggungjawaban UMKM ini harus berdasarkan SAK EMKM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 pada bab 1, pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: a) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, b) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. c) usaha menengah

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Mikro, Kecil, Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU No 20 Tahun 2008, bab 2, pasal 3). Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 BAB I pasal 1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.

- (1) Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah tenaga kerja UMKM kurang dari 100 orang, dengan rincian kategori sebagai berikut : usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari 1-4 tenaga kerja, usaha kecil terdiri dari 5-19 tenaga kerja, usaha menengah terdiri dari 20-99 tenaga kerja, dan usaha besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 tenaga kerja atau lebih. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) tahun 2018 yang diterbitkan oleh IAI pada bab 1, paragraf 1 dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya dalam bab 1 paragraf 2 SAK EMKM, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan entitas mikro,

kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknya selama dua tahun berturut-turut. Pada bab 1 paragraf 3 dijelaskan juga bahwa SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam paragraf 1.2, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. SAK EMKM digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Menurut SAK EMKM (2016: 1) Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut.

SAK EMKM ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 namun penerapan ini diperkenankan. Apabila SAK EMKM ini telah berlaku efektif, maka perusahaan mikro, kecil, dan menengah tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK ETAP. Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan terdiri dari lima macam, yaitu Laporan Laba/Rugi, Neraca, Perubahan Modal, Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. (Isnawan 2012 : 60) Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor.

Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (SAK EMKM,2016) Tujuan laporan keuangan secara umum menurut Irham (2012:24) : 1) Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. 2) Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor yang ada dan yang profesional, kreditor, manajemen, pemerintah, dan pengguna lainnya. 3) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 4) Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya. Dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar terlebih dahulu harus ada pembenahan sistem dari dalam perusahaan itu sendiri, karena sistem yang bagus akan memudahkan dalam penerapan dan kenyataannya. Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah ("*Exposure Draft SAK EMKM*") dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 dan berlaku efektif 1 Januari 2018.

*Exposure Draft SAK EMKM* ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Diterbitkannya SAK EMKM bertujuan untuk implementasikan pada entitas mikro, kecil, dan menengah (tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang Lingkup SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan dasar akrual yang dipergunakan. Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut menurut (SAK EMKM, 2016) a. Asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas b. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik c. Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi.

a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan asset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) misalnya: penjualan, imbalan, bunga, dividen, *royalty*, dan sewa dan keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan dari pelepasan aset.

b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan asset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas

yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanaman modal. Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya: beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan serta kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.

Dasar Pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu asset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sejumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi kriteria : 1) Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos-pos asset, liabilitas, penghasilan dan beban dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas 2) Pos-pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dan andal. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, representative tepat, keterbandingan, dan keterpahaman.

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan. Laporan keuangan minimal terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. (SAK 2016: 9): Kas dan setara kas, Piutang, Persediaan, Aset tetap, Utang usaha, Utang bank dan Ekuitas. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan.
2. Laporan laba rugi selama periode SAK EMKM mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi yang meruakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut (SAK EMKM, 2016: 11): Pendapatan, Beban keuangan dan Beban pajak. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain

3. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Catatan atas laporan keuangan memuat (SAK EMKM (2016: 13) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, Ikhtisar kebijakan akuntansi dan Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan entitas mencakup pospos berikut : a) Kas dan setara kas, b) Piutang c) Persediaan d) Asset tetap e) Utang usaha f) Utang bank g) Ekuitas Laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos berikut : a) Pendapatan b) Beban keuangan c) Beban pajak Catatan atas laporan keuangan memuat : a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM b) Ikhtisar kebijakan akuntansi c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab solusi yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung.

Diharapkan melalui penelitian ini dapat membantu para UMKM dalam menjurnal pencatatan transaksi akuntansi yang diterapkan untuk UMK sektor perdagangan hingga menyusun laporan keuangan untuk sektor dagang berbasis SAK EMKM. Kusuma dan Lutfiany (2018), Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM yaitu sebesar 57,5%. Pemahaman akuntansi merupakan variabel yang paling dominan terhadap implementasi SAK EMKM. Ningtyas (2017) hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan UMKM Bintang malam berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Prajanto dan Septriana (2018) menunjukkan bahwa persepsi pengusaha akan laporan keuangan masih sangat rendah sehingga mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pengusaha UMKM tidak berpengaruh pada besaran kredit yang diperoleh UMKM. Prospek implemmentasi SAK EMKM terhadap kualitas pelaporan keuangan saat ini masih sangat minim karena pengusaha masih rendah dalam memahami pembukuan sesuai dengan SAK EMKM. Warsadi, dkk. (2017) melakukan studi kasus dengan obyek penelitian sebuah UKM yang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa UKM menyusun laporan keuangan masih sangat sederhana dan manual dikarenakan UKM hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran guna mendapatkan informasi laba saja. Berdasarkan permasalahan yang

terjadi maka kami memberikan judul penelitian ini yaitu : “Pencatatan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm Tahun 2018 Pada Ukm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Bandung”.

## **METHODS**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah UMKM yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung pada tahun 2018 sebesar 1.700 UMKM di 10 Kecamatan pada Kabupaten Bandung. Sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 25 peserta UMKM se-Kabupaten Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM Se-Jawa Barat. Sedangkan sampel yang diambil pada penelitian ini menggunakan teknik cuplikkan yang bersifat *purposive*, karena itu sampel pada penelitian ini dianggap yang dipandang cukup sah atau *valid* dan mampu dijangkau atas dasar kondisi kemampuannya sebagai peneliti dengan segala keterbatasan yang dimiliki yang bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap representative dan lebih bersifat mewakili informasinya daripada populasinya. Karena itu sampel pada penelitian ini diperoleh dari informan UMKM yang telah lama berkecimpung dan lebih lama berpengalaman dalam menyusun laporan keuangan UMKM di Kabupaten Bandung. Data penelitian yang dikumpulkan secara langsung merupakan informasi yang diperoleh berdasarkan perspektif para subjek yang diteliti dalam konteks yang alami (*natural setting*).

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari narasumber atau informant melalui teknik pengumpulan data wawancara yang tidak terstruktur dimana perihal waktu bertanya dan memberikan respon yang lebih bebas selain itu, informan atau narasumbernya terbatas hanya yang dipilih saja, yaitu yang dipandang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi serta memiliki informasi yang diperlukan. Selain itu juga data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber dokumen pencatatan dan laporan keuangan yang disajikan oleh para UMKM Se-Kabupaten Bandung. Sumber data dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Se-Kabupaten Bandung yang terdiri dari 25 pelaku UMKM.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini merupakan *soft data* yaitu data data lunak (*soft data*) yang berupa kata, ungkapan, kalimat dan tindakan, bukan merupakan data keras (*hard data*) yang berupa angka-angka statistik, seperti dalam penelitian kuantitatif. Kredibilitas data agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai titik tolak penarikan simpulan. Menurut Subroto (1992:34), kredibilitas data penelitian dapat dilihat dari tingkat kesahihan (*validitas*) dan keajegan (*reliabilitas*) data tersebut. Tanpa

memenuhi syarat tersebut, penelitian tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmu pengetahuan. *Validitas* data pada penelitian ini berupa validitas data dilakukan melalui informant *review* dan kecukupan referensi. *Informant review* artinya sebelum data disajikan, didiskusikan terlebih dahulu dengan informant sebagai sumber datanya sehingga data yang ditemukan tidak diragukan keabsahannya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pijakan dalam menarik simpulan penelitian. Sedangkan kecukupan referensi merupakan alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis maupun kepentingan evaluasi. Dengan demikian, bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patikan untuk menguji sewaktu-waktu dilakukan analisis dan penafsiran data. *Reabilitas* data pada penelitian ini diperoleh melalui uraian rinci (*Thick Description*) yang artinya uraian secara teliti, dan cermat, mengenai gambaran konteks tempat dan peristiwa dalam penelitian yang dilaksanakan. Dalam uraian rinci ini peneliti melaporkan hasil penelitiannya dengan terfokus, dan menggambarkan dengan jelas temuan-temuan penelitian dalam kejadian yang nyata dan kontekstual. Untuk dapat memberikan uraian rinci ini, peneliti sangat membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang masalah yang menjadi fokus kajiannya.

Dalam penelitian ini, analisis data digunakan dengan pendekatan kepustakaan melalui berbagai literatur atau penelitian Pustaka atau adekuasi. Selain itu penelitian ini menggunakan Focus Group Discussion. Pendekatan ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena dalam pencatatan akuntansi yang diterapkan UMK sektor perdagangan dan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan sektor perdagangan yang berbasis SAK EMKM. Penelitian ini dilakukan pada UMK di Wilayah Selatan Kabupaten Bandung yang mendapatkan bantuan modal dari BumDes Kabupaten Bandung. Metode analisis data sekunder dilakukan dengan *content analysis*, menurut Yin (2000:109), kegiatan dalam menganalisis isi dokumen, sebab dalam kegiatan itu peneliti bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen, tetapi juga memahami makna yang tersirat dalam dokumen dengan hati-hati, teliti, dan kritis.

## RESULTS

### Data Primer

Data primer yang diperoleh dari narasumber atau informant melalui teknik pengumpulan data wawancara yang tidak terstruktur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya serta melalui *Focus Group Discussion*, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pencatatan Akuntansi untuk UMK Sektor Perdagangan. Pada penelitian ini membahas tentang perusahaan dagang. Hal ini terlihat dari siklus operasi bisnis. Aktivitas bisnis jasa berbeda dari kegiatan bisnis *merchandising*. Perbedaan-perbedaan ini tercermin dalam siklus operasi bisnis

jasa dan perdagangan serta dalam laporan keuangannya. Siklus Operasi Siklus operasi adalah proses di mana perusahaan membelanjakan uang tunai, menghasilkan pendapatan, dan menerima uang tunai baik pada saat pendapatan dihasilkan atau nanti dengan mengumpulkan piutang usaha. Siklus operasi layanan dan bisnis *merchandising* berbeda karena bisnis *merchandising* harus membeli barang dagangan untuk dijual kepada pelanggan. Ada dua sistem untuk akuntansi untuk transaksi barang dagangan: *perpetual* dan *periodik*. Dalam sistem persediaan *perpetual*, setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar pembantu terkait. Dengan cara ini, jumlah barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual terus diperbarui (*terus-menerus*) dalam catatan persediaan. Dalam sistem persediaan *periodik*, persediaan tidak menunjukkan jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual. Sebagai gantinya, daftar inventaris yang ada, yang disebut inventaris fisik, disiapkan pada akhir periode akuntansi. Inventaris fisik ini digunakan untuk menentukan biaya barang dagangan yang ada di akhir periode dan biaya barang dagangan yang dijual selama periode tersebut.

2. Penyusunan laporan keuangan sektor perdagangan berbasis SAK EMKM. Peneliti menyusun laporan keuangan UMKM Kabupaten Bandung dengan beberapa tahapan yaitu tahap pencatatan, tahap pengihtisaran dan tahap pelaporan keuangan.

- 1) Tahap Pencatatan. Tahap pencatatan meliputi sebagai berikut : perusahaan melakukan transaksi- transaksi, pencatatan bukti-bukti transaksi ke dalam buku harian (*jurnal*), pemindah bukuan (*posting*) dari buku harian ke buku besar dengan perkiraan yang dirancang perusahaan. Penjurnalan ialah meringkas transaksi secara urut waktu (*kronologis*). Penjurnalan harus tetap mencantumkan informasi penting yang bermanfaat untuk proses akuntansi. Jenis informasi yang terekam di penjurnalan tergantung pada kebutuhan UMKM. Misalkan UMKM membayar honorarium berdasarkan jumlah penjualan yang dihasilkan tenaga pemasaran pun pasti memerlukan informasi tentang para karyawan yang terlibat di setiap transaksi penjualan, bukan semata nilai transaksi dari penjualan tersebut. Informasi penting suatu transaksi yang lazim dicantumkan pada penjurnalan antara lain :

- A. Tanggal Transaksi, menunjukkan periode terjadinya transaksi. Informasi ini penting karena akuntansi menganut konsep *periodisasi* sehingga perlu penentuan periode yang jelas tentang keterjadian setiap transaksi.
- B. Akun-akun yang berubah, yang menunjukkan akun-akun terpengaruh akibat terjadi transaksi. Informasi ini penting karena output akuntansi adalah informasi keuangan yang

disajikan berbasis akun.

- C. Nilai Rupiah Transaksi, yang menunjukkan besarnya rupiah yang disajikan pada satuan moneter. Informasi ini penting karena akuntansi menyajikan informasi dalam satuan moneter.
  - D. Deskripsi singkat transaksi dan kode akun, yang membantu memberikan informasi tambahan yang dianggap penting dan meminimalkan kesalahan.
  - E. Buku besar berisikan kumpulan perkiraan. Setelah jurnal umum selesai selanjutnya membuat buku besar, proses pemindahan dari jurnal umum ke buku besar disebut posting (Firdausi, 2016). Pemindahbukuan dapat dilakukan akhir hari/minggu/bulan atau saat penjurnalan transaksi diselesaikan (Wijaya, 2018). Terdapat 2 (dua) jenis buku besar antara lain : Buku Besar Utama (*General Ledger*) yang memuat kumpulan akun yang tercantum pada laporan keuangan dan Buku Besar Pembantu (*Subsidiary Ledger*) yang memuat kumpulan akun yang merupakan rincian dari salah satu akun yang ada pada buku besar utama.
- 2). Tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran meliputi neraca saldo, penyesuaian dan kertas kerja. Data pencatatan neraca saldo bersumber dari saldo-saldo sementara akun buku besar yang dibuka oleh perusahaan. Neraca saldo berfungsi untuk menguji keseimbangan dan kebenaran pencatatan dalam jurnal dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh perusahaan. Penyesuaian dilakukan adalah data pemakaian perlengkapan, persediaan barang dagang, terkait pengakuan biaya penyusutan, pengakuan biaya bahan habis pakai, pengakuan sebagian biaya dibayar dimuka yang berubah menjadi biaya, pengakuan biaya yang belum dibayar secara tunai, pengakuan sebagian pendapatan diterima dimuka yang sudah berubah menjadi pendapatan, pengakuan pendapatan yang belum diterima kas. Pos-pos yang dilakukan penyesuaian antara lain : biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pemakaian atau biaya persediaan dan penyusutan aset tetap. Setelah neraca saldo disusun dan yang mengalami penyesuaian dibuatkan ayat jurnal penyesuaian, selanjutnya untuk mempermudah mendapatkan data neraca saldo disesuaikan sebagai dari penyusunan laporan keuangan maka perlu dibuatkan kertas kerja. Kertas kerja meliputi Neraca Saldo, Ayat Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Penyesuaian, Laporan Laba/Rugi, Ayat Jurnal Penutup, Neraca Lajur, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

- 3) Tahap pelaporan. Tahap pelaporan adalah tahap penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan SAK EMKM berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan SAK UMKM. Tahapan Pelaporan meliputi: Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Pos-pos yang terdapat di dalamnya kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank dan ekuitas. Selain itu membuat Laporan Laba Rugi yang menginformasikan tentang laba atau rugi bersih yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Pos-pos yang terdapat di dalamnya pendapatan, beban keuangan dan beban pajak.
- 4). Jurnal penutup. Menurut Priyati (2013: 67), "jurnal penutup adalah jurnal yang umumnya dibuat pada akhir periode untuk menutup atau men-nol-kan saldo perkiraan-perkiraan nominal/temporer". UMKM juga memperhitungkan pengembalian ekuitas (di dalam UMKM yang berbadan hukum perseorangan ditampung di akun pribadi) ke akun ekuitas dengan cara memindahkan akun pengembalian ekuitas yang dilakukan selama periode berjalan ke akun ekuitas. Agar memudahkan akun-akun tersebut, maka UMKM melakukan pencatatan penutup (*Closing Entries*) (Wijaya, 2018). Beberapa perkiraan yang termasuk ke dalam perkiraan nominal yang perlu ditutup adalah sebagai berikut: pendapatan-pendapatan, biaya-biaya, saldo laba rugi, saldo prive (bagi perusahaan perseorangan), dan saldo deviden (bagi Perseroan Terbatas). Tujuan dilakukannya pencatatan penutup (Wijaya, 2018), antara lain :
- a. Memindahkan akun-akun pendapatan dan biaya ke akun ekuitas. Hal ini dilakukan agar UMKM dapat memperoleh informasi keuangan tentang pengukuran kinerja UMKM.
  - b. Memindahkan laba/rugi yang terdapat di akun ikhtisar laba/rugi ke akun ekuitas. Akun ikhtisar laba/rugi ini menunjukkan besarnya laba atau rugi yang dialami UMKM dalam satu periode. Penutupan akun pendapatan dan biaya ke ikhtisar laba/rugi agar mengetahui langsung berapa besarnya laba/rugi UMKM. Akuntansi itu memindahkan laba/rugi melalui pencatatan penutup ke akun ekuitas.
  - c. Memindahkan akun pengembalian ekuitas ke akun ekuitas. Selama periode berjalan transaksi yang terkait dengan pengembalian ekuitas di catat di akun yang terpisah dari akun ekuitas. Pada akhir periode, UMKM dapat memperhitungkan pengembalian ekuitas ke akun ekuitas melalui penutupan akun dari akun pengembalian ekuitas. Di UMKM yang berbadan hukum perusahaan perseorangan dan persekutuan, akun pengembalian ekuitas yang lazim adalah akun pribadi atau prive. Jurnal penutup

merupakan jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan akan menambah modal pemilik dan beban serta prive akan mengurangi modal pemilik.

### **Data Sekunder**

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari sumber dokumen pencatatan dan laporan keuangan yang disajikan oleh para UMKM Se-Kabupaten Bandung melalui *Focus Group Discussion*, maka diperoleh beberapa hasil sebagai berikut :

1. Pencatatan Akuntansi untuk UMK Sektor Perdagangan. Beberapa akun penjurnalan sistem pencatatan periodik untuk perusahaan dagang antara lain :
- 2) Penyusunan laporan keuangan sektor perdagangan berbasis SAK EMKM. Penyusunan laporan keuangan dalam penelitian ini menyarankan hanya dalam 3 bentuk laporan sesuai SAK EMKM yang disarankan yaitu : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **DISCUSSION**

### **Pencatatan Akuntansi**

Pada umumnya mengelola keuangan sebagai tingkat pemula pada bisnis UMK di sektor perdagangan di sarankan untuk menggunakan metode sistem pencatatan periodik karena itu *stock opname* atau pemeriksaan fisik atas barang perlu di lakukan namun jika tingkat pemahaman sudah pada tingkat mahir disarankan untuk menggunakan metode sistem pencatatan pepertual dengan menggunakan kartu stock saja namun sesekali disarankan pada penelitian ini perlu dilakukan pengecekan secara fisik juga untuk mengecek kesesuaian jumlah barang antara kartu *stock* dengan jumlah fisik barang yang ada di gudang. Sedangkan dalam sistem persediaan pepertual, setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar pembantu terkait. Dengan cara ini, jumlah barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual terus diperbarui (terus-menerus) dalam catatan persediaan.

### **Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Perdagangan berbasis SAK EMKM**

Kode akun transaksi ini sangat diperlukan saat pelaporan keuangan dilakukan, dimana kode akun ini sangat dibutuhkan saat menjurnal, memposting ke buku besar. Karena nilai akhir masing-masing dari transaksi yang diposting ke buku besar akan dimasukkan ke neraca saldo yang

merupakan bagian dari neraca lajur. Adapun neraca lajur merupakan kumpulan dari perkiraan mulai dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian serta perkiraan Rugi/Laba. Setelah kumpulan neraca lajur dilakukan ditutup dengan jurnal penutup di akhir tahun. Pada penelitian ini menambahkan Laporan Perubahan Modal yang karenanya nilai dari tambahan modal pemilik usaha UMK harus diinput atau diperhitungkan pada saat pembuatan Laporan Posisi Keuangan di Akhir Periode. Laporan posisi keuangan yang dimaksud laporan posisi keuangan yang sering disebut dengan neraca lajur setelah menyesuaikan antara nilai neraca saldo dengan ayat-ayat jurnal penyesuaian yang terjadi. Untuk metode sistem pencatatan pepertual tidak perlu membuat jurnal penyesuaian jika jumlah antara hasil stock opname lebih kecil dibandingkan dengan jumlah persediaan akhir di neraca saldo yang belum disesuaikan namun jika sebaliknya hasil *stock opname* lebih besar dibanding jumlah persediaan akhir di neraca saldo yang belum disesuaikan maka perlu dilakukan jurnal pembalik dengan mendebitkan akun persediaan dan mengkreditkan akun HPP. Selain itu jangan lupa memasukkan laporan perubahan modal untuk memberikan informasi apakah ada tambahan modal atau malah terjadi penurunan modal pemilik UMK di akhir tahun periode. Pada laporan laba rugi periodik, perlu menghitung besarnya jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual. Hal ini dikarenakan pada sistem pencatatan transaksinya tidak menunjukkan hal ini sehingga perlu menginventarisir fisik barang di dengan melakukan *stock opname* di Gudang. Hal ini digunakan untuk menentukan biaya barang dagangan yang ada di akhir periode dan biaya barang dagangan yang dijual selama periode tersebut. Pada laporan laba rugi pepertual, dalam sistem persediaan pepertual, setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar pembantu terkait. Dengan cara ini, jumlah barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual terus diperbarui (terus-menerus) dalam catatan persediaan. Sehingga tidak perlu melakukan *stock opname* di Gudang melainkan menggunakan kartu stock serta tidak perlu menentukan biaya barang dagangan yang ada di akhir periode dan biaya barang dagangan yang dijual selama periode tersebut.

Jurnal penutup dilakukan di akhir periode. Untuk sistem pencatatan periodik harus membuat jurnal penutup pada akhir periode akuntansi. Hal ini bertujuan untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut berubah nilainya menjadi nol (0) pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup merupakan akun nominal dan akun pembantu modal. Akun nominal meliputi pendapatan dan beban sedangkan akun pembantu modal meliputi prive dan ikhtisar laba/rugi. Saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan di akhir periode sehingga nilainya akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan pada neraca setelah penyesuaian. Memisahkan akun nominal pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah akun nominal dan pendapatan di periode selanjutnya. Setelah jurnal penutup di posting ke setiap akun

maka yang tersisa adalah perkiraan riil berupa asset, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan modal. Melalui jurnal penutup ini, kita dapat menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku periode sekarang sehingga dapat mudah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan periode akuntansi selanjutnya. Pada sistem pencatatan periodik, pencatatan pendapatan dari penjualan dilakukan dengan cara yang sama dengan sistem pepertual pada setiap kali terjadi penjualan. Namun harga pokok penjualan tidak ikut dicatat setiap kali terjadi penjualan. Sedangkan pada jurnal penutup sistem pepertual persediaan barang, potongan pembelian, retur pembelian dan jumlah barang yang dibeli dan dijual dicatat dalam akun persediaan dan buku besar pembantu terkait. Dengan cara ini, jumlah barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual terus diperbarui (terus-menerus) dalam catatan persediaan sehingga secara otomatis jumlah harga pokok penjualan dapat diketahui jumlah nilai uangnya. Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan (CALK), berisikan informasi-informasi yang tertera berupa informasi tentang Akta Pendirian Entitas, pernyataan kepatuhan dalam *Good Governance* secara kualitatif, Informasi tentang asset tetap, besarnya jumlah giro, besarnya jumlah deposito, besarnya jumlah utang bank, jumlah laba yang diperoleh serta pajak penghasilan, di dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM tahun 2018 seperti besarnya piutang tidak tertagih, metode persediaan yang digunakan dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yang disajikan berikut ayat jurnal penyesuaian jika menggunakan sistem pencatatan periodik seperti biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, biaya persediaan, penyusutan asset tetap.

## CONCLUSIONS

### Simpulan

Simpulan pada penelitian ini antara lain :

1. Sistem pencatatan yang disarankan ada 2 yaitu sistem pencatatan periodik dan sistem pencatatan pepertual. Dalam sistem persediaan pepertual, setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar pembantu terkait. Dengan cara ini, jumlah barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual terus diperbarui (terus-menerus) dalam catatan persediaan. Dalam sistem persediaan periodik, persediaan tidak menunjukkan jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual. Sebagai gantinya, daftar inventaris yang ada, yang disebut inventaris fisik, disiapkan pada akhir periode akuntansi. Inventaris fisik ini

digunakan untuk menentukan biaya barang dagangan yang ada di akhir periode dan biaya barang dagangan yang dijual selama periode tersebut.

2. Untuk metode sistem pencatatan perpetual tidak perlu membuat jurnal penyesuaian jika jumlah antara hasil *stock opname* lebih kecil dibandingkan dengan jumlah persediaan akhir di neraca saldo yang belum disesuaikan namun jika sebaliknya hasil *stock opname* lebih besar dibanding jumlah persediaan akhir di neraca saldo yang belum disesuaikan maka perlu dilakukan jurnal pembalik dengan mendebitkan akun persediaan dan mengkreditkan akun HPP. Sedangkan metode sistem pencatatan periodik wajib membuat jurnal penyesuaian.
3. Pada laporan laba rugi periodik, perlu menghitung besarnya jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual. Pada laporan laba rugi perpetual, dalam sistem persediaan perpetual, setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar pembantu terkait.
4. Pada jurnal penutup, Pada sistem pencatatan periodik, pencatatan pendapatan dari penjualan dilakukan dengan cara yang sama dengan sistem perpetual pada setiap kali terjadi penjualan. Namun harga pokok penjualan tidak ikut dicatat setiap kali terjadi penjualan. Sedangkan pada jurnal penutup sistem perpetual persediaan barang, potongan pembelian, retur pembelian dan jumlah barang yang dibeli dan dijual dicatat dalam akun persediaan dan buku besar pembantu terkait. Dalam catatan atas laporan keuangan (CALK), berisikan informasi-informasi yang tertera berupa informasi tentang Akta Pendirian Entitas, pernyataan kepatuhan dalam *Good Governance* secara kualitatif, Informasi tentang asset tetap, besarnya jumlah giro, besarnya jumlah deposito, besarnya jumlah utang bank, jumlah laba yang diperoleh serta pajak penghasilan, di dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM tahun 2018 seperti besarnya piutang tidak tertagih, metode persediaan yang digunakan dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yang disajikan berikut ayat jurnal penyesuaian jika menggunakan sistem pencatatan periodik seperti biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, biaya persediaan, penyusutan asset tetap.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung Prajanto dan Ira Septriana. 2018. Implementasi Penerapan SAK EMKM serta Dampaknya pada Kualitas Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Se Kota Semarang). Vol. 20 No. 2. P. 79-89. ISSN 1693-928X.
- Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersya Tri Wahyuni, Amir Abadi Jusuf. 2017. Accounting. Volume 1. Penerbit Erlangga. Cengage Learning.

- Fahmi, Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Cetakan kedua. Bandung: Alfabeta.
- Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat. 2013. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1286-1295.
- Hermi Sularsih, Amar Sobir. 2019. Penerapan Akuntansi SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *JAMSWAP; Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. ISSN : 2086-3659 (P), Volume 4, Nomor 4 (2019): 10-16.
- I.C. Kusuma, V. Lutfiany. 2018. Persepsi UMKM dalam Memahami SAK EMKM *SMEs Perceptions In Understanding The Accounting Standard For SMEs*. *JURNAL AKUNIDA*. Volume 4 Nomor 2. P. 1 -16. ISSN 2442-3033.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 01 Revisi 2009.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Isnawan, Ganjar. 2012. Akuntansi Praktis Untuk UMKM. Jakarta: Laskar Aksara.
- Jilma Dewi Ayu Ningtyas. 2017. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*. Politeknik Pusmanu. Volume 2 Nomor 1. P. 11-17. e – ISSN : 2548-9224.p–ISSN : 2548- 7507.
- Ketut Ari Warsadi, Nyoman Trisna Herawati, I Putu Julianto. 2017. Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Pada PT. Mama Jaya. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 8 Nomor 2*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yananto Mihadi Putra. 2018. Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM Di Kota Tangerang Selatan. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 11 No.2. P. 201 – 2017. p-ISSN: 2086-7662. e-ISSN: 2622-1950.
- Yin, Robert K. 2000. *Case Study Research: Design and Methods* (Edisi Terjemahan M. Djauzi Mudzakir). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.